

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang juga membahas seputar “Pelaksanaan Program PKTD Oleh Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Perekonomian Petani di Desa Gonggang menunjukkan peneliti melakukan analisis terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik serupa. Langkah ini mencakup pencarian, pembacaan, dan pemahaman secara menyeluruh terhadap berbagai literatur yang ada, dengan tujuan untuk membangun kerangka referensi yang kuat dan komprehensif. Upaya ini bertujuan untuk menyediakan kerangka referensi yang kuat dan mendalam, sehingga literatur tersebut dapat dijadikan acuan yang bermanfaat dalam membandingkan dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Safran Tabo, Rifdan dan Rahim Gobel pada tahun 2022, dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa Mootilango”. Penelitian ini membahas tentang penjelasan sebuah konsep dari PKTD atau padat karya tunai desa tersebut yang artinya PKTD adalah sebuah program dari pemerintah yang meliputi kegiatan dalam rangka memberdayakan masyarakat yang ada di tingkatan desa, terkhusus bagi mereka yang tidak memiliki pendapatan yang tetap, kegiatan ini menstimulasi sumberdaya manusia dalam peningkatan perekonomian para pekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Merujuk pada Pasal 4 UU No: 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan desa, dimana desa merupakan obyek bantuan dari pemerintah pusat dalam rangka memajukan perekonomian desa. Selain itu juga konsep pemberdayaan adalah prioritas utama dalam rangka memajukan kesejahteraan dalam masyarakat desa.

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Yusril Amar Setiawan pada tahun 2022, dengan judul “Evaluasi Kebijakan Padat Karya Tunai Di Desa Pekarungan kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo”. Dalam penelitian ini diketahui bahwasannya membahas tentang Permasalahan tersebut menyebabkan pelaksanaan PKTD menjadi kurang optimal dalam

menurunkan angka kemiskinan penduduk desa, dilansir dari kanal radarsurabaya.jawapos.com, bahwa Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak menyebut wilayah desa masih menyumbang angka kemiskinan terbesar di Jawa Timur. Berdasarkan permasalahan tersebut kajian kebijakan publik menjadi penting untuk diperhatikan, setiap tahapan kebijakan publik perlu dilakukan dengan benar agar hasilnya pun maksimal.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Dita Aprilia dan Dwi Ermayanti Susilo pada tahun 2021, dengan judul penelitian “Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Adapun pembahasan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan Hasil bahwasannya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Program pembangunan sudah berjalan dengan baik akan tetapi, pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Ngrimbi dari segi dana mengalami penurunan pembiayaannya yang mempengaruhi pada penundaan pembangunan fisik desa dan lebih memfokuskan pada pembangunan infrastruktur secara swakelola dengan sistem padat karya tunai desa (PKTD) demi memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat. Dan untuk pemberdayaan masyarakat desa Ngrimbi sudah berjalan dengan baik serta mengalami peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakatnya.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Juliati Prihatim, Dimas pratama dan I Made Aldy Wijaya pada tahun 2024. Dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa di Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut utara”. Didalam penelitian ini membahas tentang program PKTD yang muncul pada 2021 pemerintah mengeluarkan program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan di desa yaitu Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Menurut Buku Pedoman Umum Padat Karya Tunai di Desa 2018, tujuan dari skema baru ini untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pesedaan. Seleksi lokasi perlu dilakukan untuk memilih lokasi yang cocok digunakan

untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) agar dapat mengetahui letak keadaan tanah dan keadaan lingkungan tersebut sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan potensi yang ada di desa dapat dikembangkan dengan semaksimal mungkin. Seleksi lokasi dilakukan sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh Lembaga, pihak yang terkait dan masyarakat. Dalam penentuan kriteria pentingnya pemilihan lokasi agar dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin sehingga tujuan dari pemberdayaan masyarakat dapat tercapai sesuai yang diinginkan.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh M Yusuf, Indriati Agustina, Ahmad Cucus dan Appin P pada tahun 2021. Dengan judul penelitian “Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Lampung”. Penelitian ini membahas tentang peningkatan kesejahteraan petani yang dapat diupayakan dengan sebuah program sehingga meningkatkan produktivitas pertanian dengan menjamin ketersediaan dan kualitas sarana produksi pertanian, meningkatkan sumber permodalan, menyediakan teknologi pertanian, melakukan pembinaan usaha tani, serta menjamin harga hasil pertanian dengan cara menjamin produksi pertanian. Seluruh upaya peningkatan kesejahteraan petani tersebut bisa diwujudkan dengan adanya Model Sistem Kartu Petani Berjaya (KPB). Kartu Petani Berjaya ini merupakan salah satu program yang menjadi upaya di bidang pertanian yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Petani, melalui pemberian kepastian ketersediaan modal, pemberian kepastian ketersediaan sarana produksi pertanian (pupuk, bibit dan obat-obatan), pembinaan manajemen usaha tani, penanganan pasca panen, penjaminan harga jual dan kepastian penyerapan hasil produksi.

Keenam, penelitian ini dilakukan oleh Hajar Risa, Badaruddin dan Munir Tanjung pada tahun 2021. Dengan judul “Implementasi Program Padat Karya Tunai Dari Dana Desa Dalam Mengatasi kemiskinan Masyarakat Desa Karang Gading”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi, kendala-kendala dan dampak implementasi program Padat Karya Tunai Desa Karang Gading terhadap kemiskinan masyarakat Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Penelitian

ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian didapat, bahwa Implementasi program Padat Karya Tunai dari Dana Desa Karang Gading pada kegiatan rabat beton penimbunan sirtu pada Dusun VI untuk tahun anggaran 2020 hasilnya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari empat aspek sesuai dengan teori Edward III dari Komunikasi yang belum maksimal, Sumberdaya belum cukup memadai, Struktur Birokrasi belum sepenuhnya tertata dengan baik, dan hanya Disposisi/Sikap sudah cukup memadai, Adapun kendala yang dihadapi yaitu Sumber daya manusia yang tidak mumpuni, dan terjadi konflik kecil berupa protes dari warga Desa yang tidak diberdayakan sebagai pekerja atau penerima upah Padat Karya Tunai Desa dan beredarnya isu bahwa Kepala Desa dan TPK hanya memberdayakan keluarga dan kerabat sebagai pekerja/penerima upah Padat Karya Tunai Desa.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Dadan Haryono dan Evi Silviana pada tahun 2023. Dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Padat Karya Tunai Desa Dari Dana Desa Di Desa Cipakat Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya”. Didalam penelitian ini menjelaskan bahwasanya dana desa didirikan dengan menggunakan prinsip bangunan partisipatif, yaitu mengutamakan penduduk desa sebagai subjek pembangunan, oleh karena itu , rencana penggunaan dana desa harus dibahas dan disusun dalam musyawarah desa serta fokus penggunaan dana desa adalah untuk mencapai tujuan tersebut seperti halnya tujuan yang tertuang dalam proyek pembangunan desa, antara lain meningkatkan taraf hidup manusia, membina kohesi masyarakat, dan menjaga lingkungan. Banyaknya penolakan terhadap penggunaan yang berasal dana desa dalam pembangunan infrastruktur dapat menghambat pencapaian tujuan desa karena hal ini pada tahun 2019, fokus dana desa adalah pada peningkatan produktivitas perekonomian, peningkatan kualitas layanan dasar seperti pencegahan stunting dan perawatan anak, serta pelaksanaan program baru

seperti kampanye ikan tuna untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat yang masih ada di garis kemiskinan.

Kedelapan, penelitian ini dilakukan oleh Tiara Rama Dian pada tahun 2019. Dengan judul “Pemeberdayaan Masyarakat Melalui Program Padat Karya Tunai Desa (Studi kasus Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru kabupaten Tulungagung”. Dalam penelitian ini membahas tentang Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang dihadapi oleh seluruh negara yang ada didunia salah satunya Indonesia. Pengertian kemiskinan itu sendiri adalah keadaan, dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut World Bank, standar kemiskinan seseorang terkategori sangat miskin jika memiliki pendapatan pengeluaran kurang dari 1.9 dolar per kapita per hari. Sedangkan Badan Pusat Statistik menyebutkan, bahwa kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Kesembilan, penelitian ini dilakukan oleh Irfan Sofi pada tahun 2020. Dengan penelitiannya yang berjudul “Implementasi Padat Karya Tunai Dana Desa Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini membahas tentang dana desa yang artinya berasal dari anggran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeberdayaan masyarakat, sebagaimana ketentuan UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pemerintah mengalokasikan dana desa dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan public di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa. Dana desa pertama kali disalurkan pada tahun 2015, tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan dari dana desa dimana pemerintah

mengalokasikan anggaran dalam APBN sejumlah Rp.70 triliun untuk sekitar 74.955 desa.

Kesepuluh, dilakukan oleh Anak agung Gde Rai Budiasa, A. A. Gde Raka dan I Made Mardika pada tahun 2019. Dengan penelitiannya yang berjudul “implementasi kebijakan Padat karya tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih, Gianyar”. Didalam penelitian ini membahas PKT yang merupakan sebuah kegiatan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan angka stunting. Tahap implementasi pelaksanaan PKT di Desa Lebih, dilaksakan melalui 5 tahapan yaitu: tahap persiapan penggunaan dana desa, tahap perncanaan penggunaan dana desa, pelaksanaan penggunaan dana desa untuk PKT, tahap pementauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan PKT.

B. Kerangka Teori

a. Implementasi Kebijakan

Menurut teori George C. Edward (dalam Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi atau pelaksanaan program dipengaruhi oleh empat variable, yaitu.

- 1) Komunikasi, yaitu merujuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksanaan program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (*target group*). Tujuan dan sasaran dari program atau kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya.
- 2) Sumber Daya, yaitu merujuk pada setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya adalah

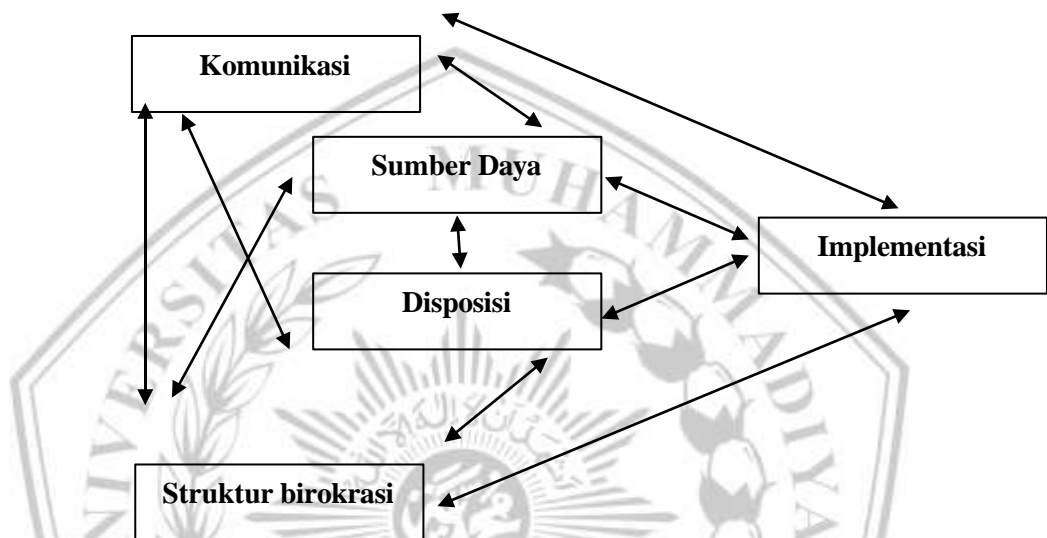
kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementator yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran

- 3) Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementator kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementator adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementator yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan
- 4) Struktur Birokrasi, menunjukan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui Standar Operating Procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang

dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.

Keempat variable di atas merupakan model yang dibangun oleh Edward yang mana memiliki keterkaitan anatar satu faktor dengan yang lainnya dalam mencapai tujuan dan sasaran sebuah program atau kebijakan.

Gambar 2. 1 Model Pendekatan Edward III (1980:48)



Sumber: <https://media.neliti.com/media/publications/218199-implementation-kebijakan-perspektif-model.pdf>

Model implementasi Edward seperti diatas dapat digunakan untuk menggambarkan implementasi program diberbagai tempat dan waktu. Artinya, empat variabel yang tersedia dalam model dapat digunakan untuk mencitra fenomena implementasi. Komunikasi adalah proses mengkomunikasikan kebijakan kepada pelaku kebijakan dan kelompok sasaran, yang berfokus pada masalah kebijakan. Proses komunikasi ini membantu para pelaku yang teridentifikasi dalam struktur birokrasi memahami substansi kebijakan, yang mencakup apa itu, apa itu, tujuan, sasaran, dan arahnya. Dengan mengetahui dan memahami substansi kebijakan, akan lebih mudah menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) sebagai dimensi dari struktur birokrasi. Jika substansi kebijakan dan prosedur prosedur pelaksanaan (SOP) pelaksanaan kebijakan lebih jelas,

disposisi para pelaku kebijakan akan menjadi lebih jelas. Semakin jelas substansi dan SOP pelaksanaan kebijakan, semakin mudah para pelaku kebijakan menerima, tidak mau tahu, atau menolak kehadiran kebijakan yang menyebabkan disposisi seseorang untuk melaksanakan kebijakan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, struktur birokrasi mencakup elemen struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Oleh karena itu, struktur birokrasi dibagi menjadi dua kategori: fragmentasi dan Standar Prosedur Kerja (SOP). Struktur birokrasi ini memengaruhi kualitas komunikasi. Semakin terfragmentasi struktur birokrasi, semakin banyak koordinasi yang diperlukan, yang berpotensi menyebabkan distorsi komunikasi. Jika komunikasi kebijakan rusak, sangat mungkin bahwa para aktor kebijakan tidak tahu atau tidak memahami substansi kebijakan dengan benar.

Akibatnya, kemungkinan gagalnya pelaksanaan kebijakan juga semakin tinggi. Dengan cara yang sama, semakin jelas standar prosedur operasional (SOP) semakin mudah menentukan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika sumber daya yang diperlukan para pelaku kebijakan ditetapkan dengan benar, peluang pelaksanaan kebijakan akan berhasil. Sebaliknya, jika sumber daya yang tersedia dan diperlukan tidak cukup atau terbatas, peluang kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan akan meningkat.

Struktur birokrasi juga memengaruhi bagaimana para pelaku kebijakan disposisi. Semakin terfragmentasi para pelaku kebijakan, semakin banyak konflik yang terjadi di antara mereka. Akibatnya, hubungan mereka menjadi tidak harmonis. Konflik dan hubungan yang tidak harmonis antara pelaku kebijakan ini pasti akan menyebabkan mereka berbeda dalam melaksanakan kebijakan. Akibatnya, kemungkinan pelaksanaan kebijakan akan gagal.